Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi
Vol. 4 No. 2 Tahun 2025
e:ISSN: 2828-7770, p-ISSN: 2985-573x, Hal 383-395
Annisa Larasati Chairani,Rindy Putri Hapsari, Ina Masruroh
Available Online at: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/index

Memahami Kebijakan Fiskal di Indonesia: Pemetaan Melalui Systematic Literature Review

Annisa Larasati Chairani[1], Rindy Putri Hapsari[2], Ina Masruroh[3]
[1,2,3]Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, Indonesia
email: [1]annisalarasatichairani@fisip.unsri.ac.id, [1]rindyputrihapsari@fisip.unsri.ac.id,
[3]inamasruroh@fisip.unsri.ac.id

Article Information	Submit: 13-08-2025	Revised: 24-08-2025	Accepted: 31-08-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perkembangan kajian kebijakan fiskal di Indonesia melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Analisis dilakukan terhadap 44 artikel terindeks Scopus dengan fokus pada tren publikasi, kontribusi penulis, pengelompokan tema penelitian, serta identifikasi topik dominan dari tahun ke tahun. Hasil kajian menunjukkan adanya peningkatan publikasi yang signifikan pada 2017 dan 2024, dengan kontribusi penulis yang berasal dari beragam institusi. Analisis klaster mengungkap sepuluh kelompok tema yang mencerminkan pergeseran fokus penelitian menuju isu-isu kebijakan fiskal yang lebih spesifik dan kontekstual sesuai dinamika ekonomi nasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan menyeluruh terhadap arah riset kebijakan fiskal di Indonesia yang belum banyak dilakukan secara sistematis. Temuan ini menegaskan pentingnya pengembangan agenda riset yang lebih terarah serta memberikan implikasi strategis bagi peneliti dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan fiskal yang adaptif dan berbasis bukti.
Kata kunci: Indonesia, Kebijakan fiskal, Systematic literature review

Abstract

This study aims to map the development of fiscal policy research in Indonesia using a Systematic Literature Review *(SLR) approach. The analysis covers 44 Scopus-indexed articles, focusing on publication trends, author contributions, thematic clustering, and the identification of dominant topics over time. The findings reveal a significant increase in publications in 2017 and 2024, with contributions from diverse institutions. Cluster analysis identifies ten research themes, reflecting a shift toward more specific and contextual fiscal policy issues in line with national economic dynamics. The novelty of this study lies in its comprehensive and systematic mapping of fiscal policy research in Indonesia, which has not been extensively conducted before. These findings underscore the importance of developing more targeted research agendas and provide strategic implications for scholars and policymakers in formulating adaptive and evidence-based fiscal policies.*
Keywords: *Fiscal policy*, *Indonesia, Systematic literature review.*

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal memegang peranan krusial dalam menopang pembangunan suatu negara melalui pengelolaan sumber daya keuangan yang efektif dan efisien (F. M. Sari et al., 2024). Pendapatan dari pajak dialokasikan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, menjalankan roda pemerintahan, melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (D. A. Susanto, 2022). Sebagai instrumen fiskal yang krusial, penerimaan pajak memiliki implikasi yang luas bagi keberlangsungan negara, tidak hanya mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik, tetapi juga menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Kalventri & Mulyani, 2022). Kebijakan fiskal memiliki beberapa tujuan penting, termasuk peningkatan investasi, pengarahan investasi ke sektor sosial, penciptaan lapangan kerja, stabilisasi ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian global, pengendalian inflasi, dan peningkatan pendapatan nasional (Hendarsih, 2023). Implementasi kebijakan fiskal yang efektif memerlukan strategi yang komprehensif dan adaptif, mengingat dinamika ekonomi yang terus berubah dan kompleksitas tantangan yang dihadapi (Kholis & Kurniawati, 2022). Kebijakan fiskal di Indonesia menjadi instrumen vital untuk mencapai

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i1.1520

Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi
Vol. 4 No. 2 Tahun 2025
e:ISSN: 2828-7770, p-ISSN: 2985-573x, Hal 383-395
Annisa Larasati Chairani,Rindy Putri Hapsari, Ina Masruroh
Available Online at: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/index

kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang implementasi dan efektivitasnya dalam konteks domestik. Namun, realisasi penerimaan pajak di Indonesia seringkali mengalami fluktuasi dan tidak jarang berada di bawah target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebuah fenomena yang dikenal sebagai pajak (E. A. Susanto & Muslimin, 2022).

Kebijakan fiskal memegang peranan krusial dalam menstabilkan perekonomian suatu negara, terutama Indonesia, yang memiliki dinamika ekonomi kompleks dan tantangan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah memanfaatkan instrumen kebijakan fiskal seperti perpajakan, belanja negara, dan pengelolaan utang untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi makro, mengendalikan inflasi, mendistribusikan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (F. M. Sari et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal berfungsi sebagai sarana vital untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan, termasuk peningkatan investasi, pengarahan investasi ke sektor-sektor sosial, penciptaan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global (Hendarsih, 2023). Studi komprehensif mengenai efektivitas dan implikasi kebijakan fiskal di Indonesia sangat penting untuk mengidentifikasi area peningkatan dan potensi permasalahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan secara sistematis literatur terkait kebijakan fiskal di Indonesia, dengan fokus pada identifikasi tren penelitian, metodologi yang digunakan, serta temuan-temuan kunci yang relevan. Pendekatan ini akan memberikan gambaran holistik mengenai diskursus akademik seputar kebijakan fiskal, mengidentifikasi celah penelitian, dan menyajikan sintesis pengetahuan yang ada untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih baik. Pajak, sebagai salah satu komponen utama kebijakan fiskal, merupakan kontribusi wajib yang dipungut pemerintah berdasarkan undang-undang untuk membiayai pembangunan dan memenuhi keperluan negara demi kemakmuran rakyat (Antari Yuliana et al., 2023). Penerimaan perpajakan menjadi sumber pendapatan terbesar bagi negara, berperan sebagai instrumen fiskal untuk membangun negara, mendukung operasional pemerintahan, serta menstimulasi perekonomian nasional (Kalventri & Mulyani, 2022). Kemampuan pemerintah dalam menggali sumber dana dari dalam negeri, terutama melalui pajak, sangat esensial untuk meningkatkan kemandirian finansial bangsa dalam membiayai berbagai program pembangunan (Rismawati & Saputra, 2012). Situasi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam optimalisasi penerimaan negara, yang selanjutnya dapat mempengaruhi kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai belanja negara dan program-program pembangunan (E. A. Susanto & Muslimin, 2022).

Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana berbagai strategi fiskal, termasuk kebijakan insentif dan disinsentif pajak, telah diimplementasikan dan dampaknya terhadap pencapaian target penerimaan negara serta stabilitas makro ekonomi secara keseluruhan (Paso & Puspita, 2020). Fokus pada pajak tidak hanya terbatas pada penerimaannya, tetapi juga pada bagaimana tarif pajak efektif dan insentif pajak mempengaruhi perilaku korporasi, seperti pengungkapan laporan terintegrasi (Sugihani & Wijayanti, 2022) atau agresivitas pajak, yang pada gilirannya berdampak pada penerimaan negara. Pemahaman yang mendalam mengenai interaksi antara kebijakan fiskal, perilaku entitas ekonomi, dan penerimaan negara menjadi krusial untuk merancang strategi fiskal yang efektif dan berkelanjutan (Rahayu, 2010) (Susilo Arneta Wynne, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi secara mendalam peran kebijakan fiskal, khususnya terkait dengan penerimaan pajak, dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia (D. A. Susanto, 2022).

Penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut bagaimana berbagai komponen pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan bea masuk, berkontribusi pada pendapatan negara dan bagaimana penerimaan ini dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan nasional (Hania Cholily, 2023). Selain itu, studi ini juga akan meninjau efektivitas kebijakan fiskal dalam mengatasi isu-isu spesifik seperti penghindaran pajak dan agresivitas pajak, yang merupakan tantangan

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i1.1520

Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi
Vol. 4 No. 2 Tahun 2025
e:ISSN: 2828-7770, p-ISSN: 2985-573x, Hal 383-395
Annisa Larasati Chairani,Rindy Putri Hapsari, Ina Masruroh
Available Online at: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/index

signifikan dalam optimalisasi penerimaan negara (Anggelina et al., 2022). Meskipun demikian, terdapat urgensi untuk memahami dinamika pengaruh investasi asing langsung terhadap penerimaan pajak, mengingat potensi dampaknya yang signifikan terhadap pendapatan negara (Pratomo, 2020). Oleh karena itu, penting untuk meninjau secara sistematis literatur yang ada mengenai dampak kebijakan fiskal, termasuk insentif pajak dan upaya penegakan hukum perpajakan, terhadap penerimaan negara dan kinerja ekonomi secara keseluruhan di Indonesia (Indahsari & Fitriandi, 2021).

Pendekatan sistematis ini memungkinkan identifikasi kesenjangan penelitian yang belum terisi serta memberikan landasan kuat bagi agenda riset di masa mendatang. Secara khusus, penelitian ini akan mengelaborasi bagaimana dinamika kebijakan fiskal di Indonesia telah berkembang seiring waktu, merefleksikan perubahan prioritas pemerintah dan respons terhadap krisis ekonomi global maupun domestik. Pemetaan ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai evolusi kebijakan fiskal, dampaknya terhadap stabilitas makroekonomi, dan efektivitasnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Studi ini juga akan menyoroti bagaimana instrumen fiskal seperti pendapatan asli daerah dan dana perimbangan mempengaruhi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam konteks desentralisasi fiskal (Yanti & Nurtati, 2020). Penelitian ini juga akan membahas bagaimana kebijakan fiskal digunakan untuk memitigasi dampak dari gejolak ekonomi, seperti krisis keuangan global tahun 2008 atau pandemi COVID-19, dan dampaknya terhadap sektor riil (Bendesa & Wiwin Setyari, 2020). Dengan demikian, tinjauan literatur sistematis ini diharapkan dapat menyajikan sebuah peta jalan yang jelas bagi peneliti dan pembuat kebijakan untuk memahami secara komprehensif lanskap kebijakan fiskal di Indonesia, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut (Martiyus, 2021) (Saputri & Kamil, 2021).

Penelitian ini akan membahas potensi dari penelitian mengenai kebijakan fiskal di masa depan berdasrkan hasil pengelolaan data dari berbagai penelitian yang berasal dari Scopus. Penelitian ini akan mengidetifikasi jumlah artikel, penulis, cluster topik terkait topik fiscal policy, tema yang dominan, dan tren publikasi dengan tema fiscal policy.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang digunakan untuk mengidentifikasikan artikel-artikel bereputasi yang membahas mengenai kebijakan fiskal di Indonesia. Pada penelitian ini sumber referensi utama berasal dari artikel-artikel Scopus yang telah ditinjau untuk menemukan benang merah guna memahami kebijakan fiskal di Indonesia di beberapa tahun terakhir ini. Gambar 1 menunjukkan tahapan awal dari penelitian ini dengan menentukan topik yaitu "*fiscal policy*". Kata kunci *fiscal policy* digunakan untuk mencari artikel di *data base* Scopus dalam periode tahun 2006 – 2024. Pada tahap awal ditemukan 247 artikel dengan kata kunci tersebut. Tahap dilakukan seleksi artikel untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian, sehingga tersaring 44 artikel terpilih untuk dianalisis, dari masing-masing diekstraksi data penulis, tahun, jurnal, metode, dan fokus kajian, lalu dilakukan pemetaan tren publikasi, analisis distribusi penulis dan institusi, pengelompokan tematik melalui analisis klaster, serta sintesis temuan guna mengidentifikasi *research gap* dan implikasi kebijakan. Validitas dan reliabilitas dijaga melalui prosedur sistematis dan berlapis, termasuk mendiskusikan kembali artikel yang diragukan relevansinya, sehingga penelitian ini menyajikan gambaran komprehensif arah perkembangan kajian kebijakan fiskal di Indonesia sekaligus landasan kuat bagi penelitian dan kebijakan selanjutnya.

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i1.1520

Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi
Vol. 4 No. 2 Tahun 2025
e:ISSN: 2828-7770, p-ISSN: 2985-573x, Hal 383-395
Annisa Larasati Chairani,Rindy Putri Hapsari, Ina Masruroh
Available Online at: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/index

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Publikasi dan penulis utama

Artikel dari topik kebijakan fiskal yang digunakan sebagai referensi utama pada penelitian ini berasal dari tahapan pengumpulan data yang dijelaskan pada Gambar 1. Studi mengenai kebijakan fiskal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini terlihat rata-rata hanya ada 1 – 4 artikel yang terbit di Scopus, pada gambar 2 menunjukkan peningkatan jumlah publikasi yang cukup signifikan pada tahun 2017 dan 2019.

Gambar 1. Tahapan Pengumpulan Data

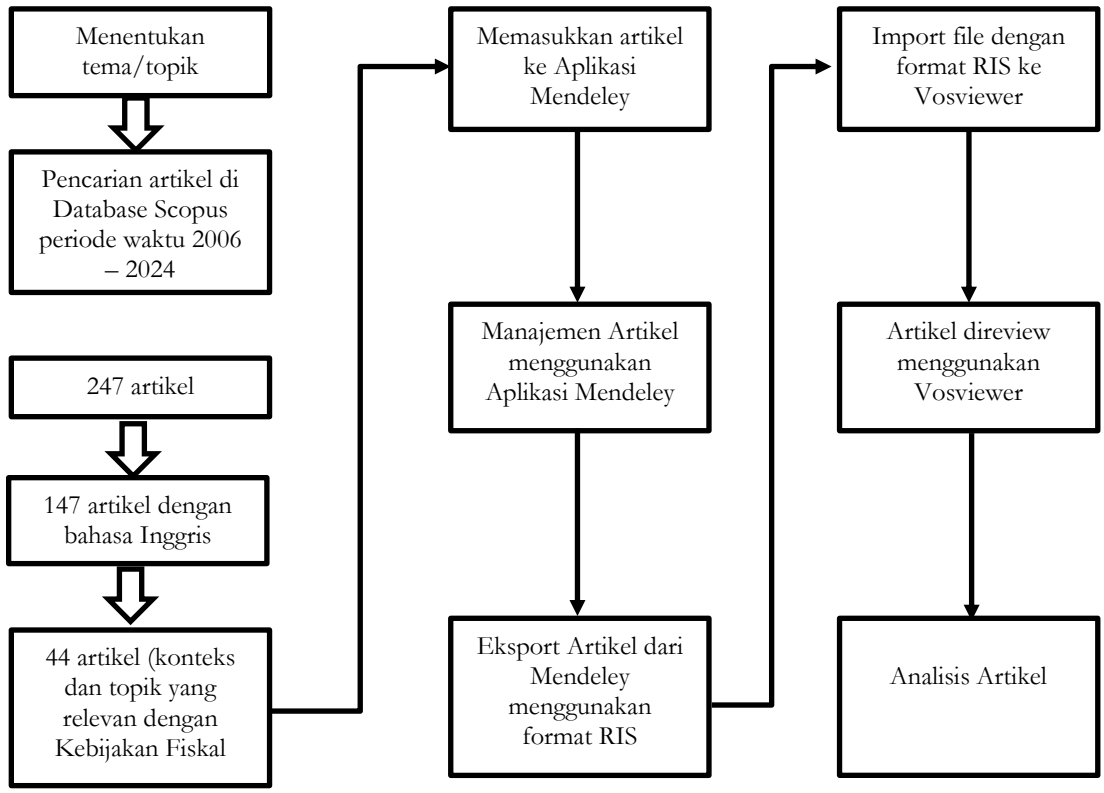

Sumber: *Database* Scopus, data diolah (2025)

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i1.1520

Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi
Vol. 4 No. 2 Tahun 2025
e:ISSN: 2828-7770, p-ISSN: 2985-573x, Hal 383-395
Annisa Larasati Chairani,Rindy Putri Hapsari, Ina Masruroh
Available Online at: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/index

Gambar 2. Jumlah Publikasi dari Tahun 2006 - 2024

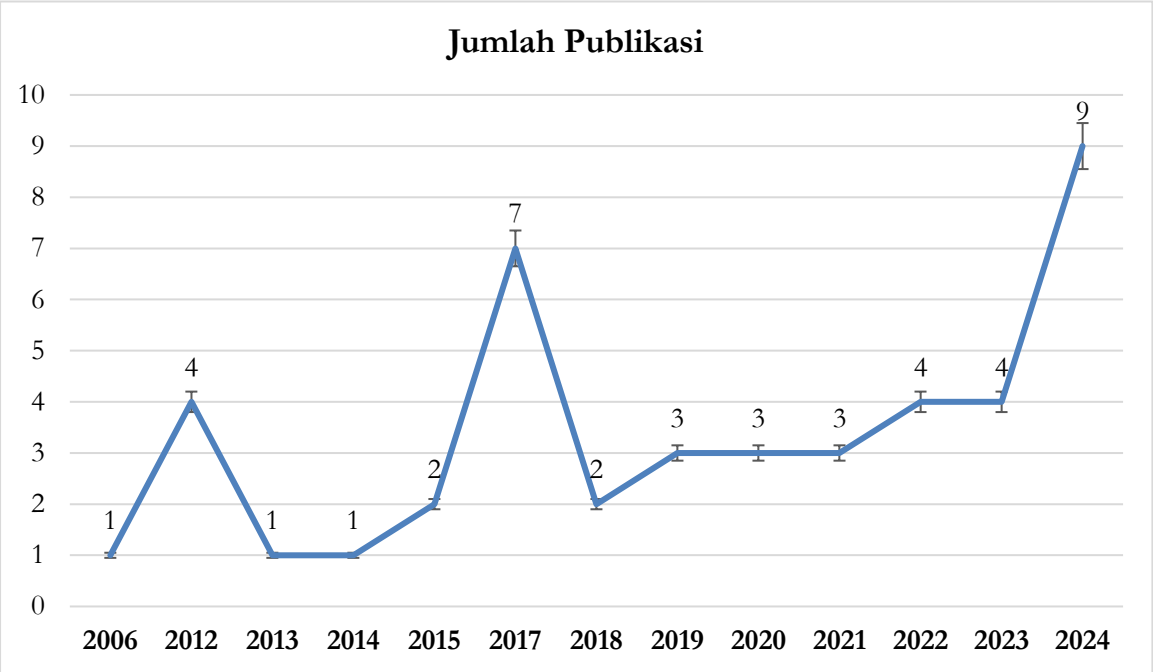

Sumber: Database Scopus, data diolah (2025)

Pada tahun 2017 ada 7 artikel yang membahas mengenai kebijakan fiskal di Indonesia, kemudian di tahun 2024 mengalami peningkatan lagi dengan jumlah 9 artikel yang membahas mengenai kebijakan fiskal. Pada periode tahun 2006 – 2024 ada empat penulis dengan publikasi terbanyak terkait tema kebijakan fiskal, yaitu Resosudarmo dengan tiga artikel yang dipublikasi pada tahun 2013, 2017, dan 2021. Kuncoro dengan tiga artikel yang dipublikasi pada tahun 20114, 2015, dan 2017. Kemudian Utama dengan dua artikel pada tahun 2020 dan 2022, serta Sriyana dengan dua artikel yang dipublikasi pada tahun 2018 dan 2019.

Gambar 3. Publikasi terkait kebijakan fiskal berdasarkan penulis (2006 - 2024)

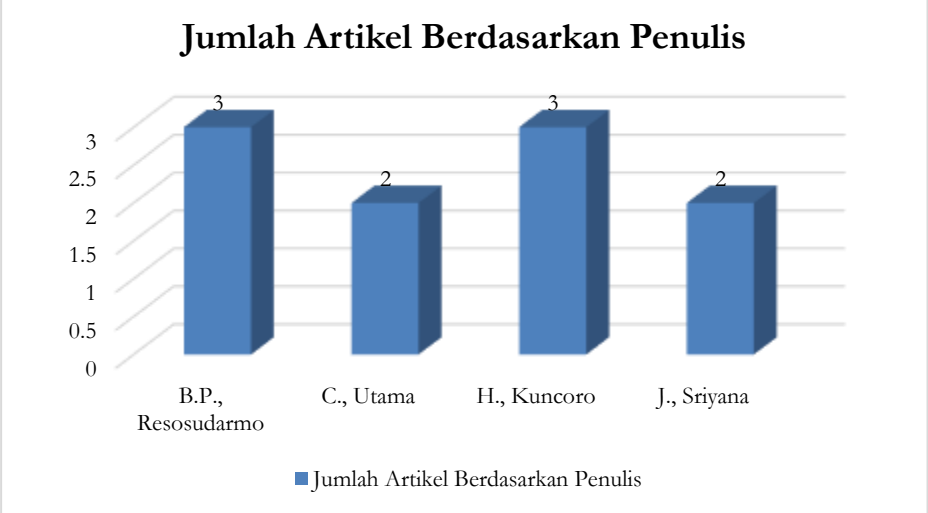

Sumber: Database Scopus, data diolah (2025)

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i1.1520

Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi
Vol. 4 No. 2 Tahun 2025
e:ISSN: 2828-7770, p-ISSN: 2985-573x, Hal 383-395
Annisa Larasati Chairani,Rindy Putri Hapsari, Ina Masruroh
Available Online at: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/index

Korelasi dan pengelompokan tema dalam studi kebijakan fiskal

Hasil tinjauan yang diolah menggunakan aplikasi VOSviewer mengkategorikan konsep-konsep berdasarkan kelompok. Gambar 4 menunjukkan berbagai konsep yang ditemukan berdasarkan hasil dari Analisa 44 artikel yang membahas mengenai kebijakan fiskal di Indonesia. Adanya 10 warna berbeda pada gambar 4 menunjukkan setiap *cluster* mengacu pada pengelompokan konsep yang berbeda.

Gambar 4. *Cluster* terkait topik *fiscal policy*

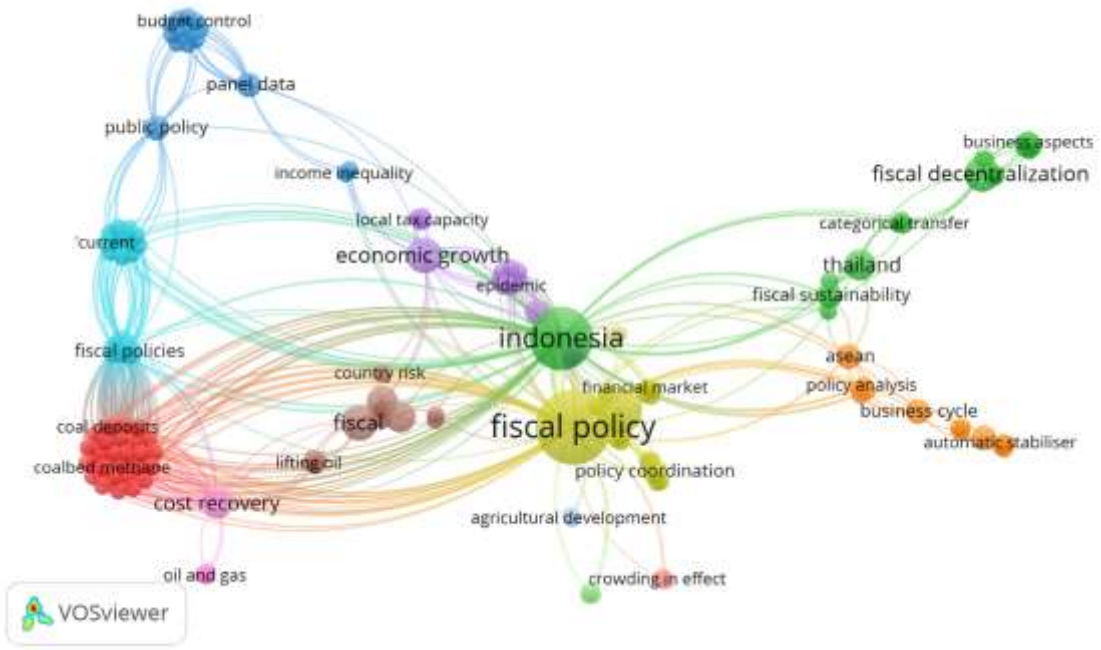

Sumber: *Database* Scopus, data diolah (2025)

Tabel 1. Kelompok tema berdasarkan *cluster*

Cluster	Tema	Total
Cluster 1	Business aspect, categorical transfer, fiscal decentralization, fiscal sustainability, Indonesia, and Thailand.	6
Cluster 2	ASEAN, automatic stabilizer, business cycle, and policy analysis.	4
Cluster 3	Budget control, income inequality, panel data, and public policy.	4
Cluster 4	Financial market, fiscal policy, and policy coordination.	3
Cluster 5	Economic growth, epidemic, and local tax capacity.	3
Cluster 6	Current and fiscal policies.	2
Cluster 7	Coal deposit and coalbed methane.	2
Cluster 8	Cost recovery, and oil and gas.	2
Cluster 9	Agricultural development	1
Cluster 10	Crowding in effect	1

Sumber: Database Scopus, data diolah (2025)

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i1.1520

Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi
Vol. 4 No. 2 Tahun 2025
e:ISSN: 2828-7770, p-ISSN: 2985-573x, Hal 383-395
Annisa Larasati Chairani,Rindy Putri Hapsari, Ina Masruroh
Available Online at: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/index

Pada *cluster* 1 kata kunci yang paling dominan yaitu Indonesia. Berdasarkan pengelompokan tersebut dapat terlihat bahwa di Indonesia aspek bisnis, transfer kategori, desentralisasi fiskal, keberlanjutan fiskal, bahkan negara Thailand memiliki keterkaitan. Kecenderungan desentralisasi fiskal di Indonesia mengarah pada pelimpahan wewenang terhadap pengelolaan sumber penerimaan negara dari pemerintah pusat kepada daerah, sehingga esensi dari desentralisasi fiskal berupa adanya diskresi atau keleluasaan daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing yang salah satu instrumennya adalah dana transfer (R. Sari, n.d.). Thailand sebagai anggota dari ASEAN bersama dengan Indonesia yang merupakan negara berkembang cenderung memiliki pola prosiklikal. Kebijakan fiskal secara regional merupakan sistem fiskal yang berlaku dan kemampuan dari sebuah negara dalam menghadapi faktor-faktor global yang sedang terjadi, sehingga pola kebijakan fiskal yang berlaku di ASEAN didasari oleh alat kebijakan fiskal yang dipilih seperti penerimaan, pengeluaran, dan *budget balances* pemerintah (Fitriaini et al., 2022).

Cluster 2 menyinggung mengenai *automatic stabilizer* yaitu kebijakan dari pemerintah yang secara otomatis menyesuaikan transfer pembayaran yang berguna untuk menstabilkan pendapatan, konsumsi dan pengeluaran bisnis selama siklus bisnis. Besarnya pengaruh *automatic stabilizer* terhadap fluktuasi siklus bisnis dipengaruhi oleh besarnya anggaran pemerintah. Semakin besar ukuran pemerintah, semakin kuat pengaruh *automatic stabilizer* terhadap fluktuasi siklus bisnis (Fatás & Mihov, 2003). Apabila sebuah negara sedang dalam kondisi resesi mereka mampu menstabilkan perekonomian dengan menurunkan pajak penghasilan sehingga daya beli tetap terjaga dan adanya transfer pembayaran yang berguna untuk menunjang masyarakat yang terkena dampak dari perekonomian yang sedang memburuk.

Budget control atau pengendalian anggaran merupakan kata kunci yang dominan pada *cluster* 3. Pengendalian ini dilakukan agar tidak menciptakan ketimpangan pendapatan di masyarakat. *Income inequality* atau ketimpangan pendapatan merupakan sebuah kondisi adanya perbedaan distribusi pendapatan antara individu atau kelompok masyarakat. Penyebab utama dari ketimpangan pendapatan yaitu ketimpangan peluang dalam akses pendidikan, ketimpangan dalam persaingan pasar kerja, ketimpangan aset kekayaan, dan ketimpangan dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan (Kakwani, 1980). Pemerintah harus terlibat dalam setiap bentuk atau sistem perekonomian, bukan hanya untuk menyediakan barang-barang publik, melainkan juga untuk mengalokasikan barang-barang produksi maupun barang konsumsi. Perbaikan distribusi pendapatan, memelihara stabilitas nasional termasuk stabilitas perekonomian, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Terutama bagi negara berkembang, kegiatan pemerintah pada umumnya diharapkan mampu meningkat, namun pemerintah juga harus bertindak sebagai pelopor dan pengendali pembangunan (Soepangat & Gaol, 1991). Hal tersebut dapat dilakukan dengan perumusan kebijakan-kebijakan yang mampu mengendalikan dan mengatasi permasalahan ketimpangan yang terjadi di masyarakat.

Fiscal policy atau kebijakan fiskal merupakan kata kunci yang paling dominan pada *cluster* 4. Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen yang penting dalam pengelolaan ekonomi negara melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal yang telah diterapkan di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti peningkatan belanja pemerintah dan pemberian insentif fiskal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi dampak negatif dari tantangan perekonomian di Indonesia (F. M. Sari et al., 2024). Hadirnya pasar keuangan (*financial market*) merupakan sebuah faktor yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah ketika pajak tidak mencukupi untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Pasar keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian dengan menyediakan modal dan menciptakan likuiditas untuk menjalankan bisnis atau berwirausaha. Adanya pasar keuangan menciptakan peluang pada

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i1.1520

Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi
Vol. 4 No. 2 Tahun 2025
e:ISSN: 2828-7770, p-ISSN: 2985-573x, Hal 383-395
Annisa Larasati Chairani,Rindy Putri Hapsari, Ina Masruroh
Available Online at: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/index

individu/kelompok yang mempunyai dana berlebih untuk menjadi investor atau memberikan pinjaman dan menciptakan ketersediaan dana bagi pihak yang membutuhkan dana. Pasar keuangan yang termasuk dalam arah dari Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK) yang dalam, likuid, efisien, inklusif, dan aman. Ada tujuh elemen yaitu pasar obligasi pemerintah, pasar obligasi korporasi, pasar uang, pasar valas, pasar saham, pasar *structured product*, dan pasar keuangan syariah (Martowardojo, 2018).

Cluster 5 kata kunci yang paling dominan berupa pertumbuhan ekonomi. Banyak faktor yang berperan dalam pembentukan dinamika ekonomi di Indonesia, khususnya konsumsi pemerintah memiliki dampak penting dan signifikan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dengan pengelolaan konsumsi yang memiliki dampak positif pada perekonomian di Indonesia. Investasi juga membawa dampak positif bagi perekonomian, sehingga diperlukan kebijakan yang mampu mendukung investasi cerdas dan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan lapangan pekerjaan. Saat terjadi Covid-19, Indonesia terkena dampak yang besar pada sektor perekonomian yang menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor. Berbagai sektor seperti pariwisata, transportasi, serta manufaktur mengalami penurunan yang pesat, namun dari sektor digital dan teknologi mengalami peningkatan (Sasmiharti & Karyati, 2024). Pajak daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebuah daerah, saat Covid-19 melanda Indonesia ada empat jenis pajak daerah yang mengalami penurunan efektivitas seperti pajak hotel, pajak hiburan, pajak air tanah, dan BPHTB (Nova & Chamalinda, 2023).

Current atau dapat diartikan keadaan saat ini pada *cluster* 6 dapat merujuk pada keadaan kebijakan fiskal dan kebijakan publik saat ini di Indonesia. Kebijakan fiskal, sebagai instrumen vital pemerintah dalam mengelola perekonomian, mencakup serangkaian langkah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara guna mencapai tujuan makro ekonomi seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan (Hardinata, 2010). Di Indonesia, kebijakan fiskal diarahkan untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi dari gejolak internasional, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan pendapatan nasional, dengan pajak sebagai salah satu pilar utamanya (Hendarsih, 2023). Pemerintah sangat bergantung pada penerimaan pajak untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunan, serta mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan eksternal (Rismawati & Saputra, 2012). Namun, terdapat isu signifikan terkait diversifikasi penerimaan pajak di Indonesia, di mana lebih dari 47% pendapatan negara berasal dari pajak penghasilan, sebuah kondisi yang berpotensi menyebabkan ketidakstabilan akun pemerintah (Martiyus, 2021). Selain itu, Indonesia menghadapi tantangan berulang berupa pajak selama lebih dari satu dekade, menandakan bahwa realisasi penerimaan perpajakan seringkali tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (E. A. Susanto & Muslimin, 2022). Hal ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem perpajakan atau tantangan dalam kepatuhan wajib pajak yang perlu dievaluasi secara mendalam untuk optimalisasi penerimaan negara (Kalventri & Mulyani, 2022). Pajak memegang peran krusial bagi negara ini karena kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar, memungkinkan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di setiap sektor guna meningkatkan kesejahteraan rakyat (D. A. Susanto, 2022). Penerimaan pajak merupakan tulang punggung anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia, secara konsisten menyumbang rata-rata sekitar 70% dari total penerimaan negara selama lima tahun terakhir, menjadikannya sumber pendapatan utama yang krusial (Paso & Puspita, 2020).

Indonesia sebagai negara dengan cadangan batubara terbesar di Asia-Pasifik, memberikan peluang sebagai sektor yang mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Pada *cluster* 7 kata kunci dominan adalah batubara dan gas, batubara saat ini masih

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i1.1520

Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi
Vol. 4 No. 2 Tahun 2025
e:ISSN: 2828-7770, p-ISSN: 2985-573x, Hal 383-395
Annisa Larasati Chairani,Rindy Putri Hapsari, Ina Masruroh
Available Online at: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/index

memegang peran dominan dalam bauran energi nasional, memberikan kontribusi besar terhadap penyediaan listrik dan pertumbuhan ekonomi. Batubara menjadi salah satu sumber energi yang masih akan diandalkan sebagai modal dasar pembangunan serta penggerak perekonomian negara pada beberapa tahun mendatang seiring dengan langkah kebijakan transisi energi yang direncanakan pemerintah (Pahlevi et al., 2024).

Pada *Cluster* 8 *cost recovery*, minyak, dan gas merupakan kata kunci yang ada. *Cost recovery* adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan perusahaan minyak dan gas untuk klaim kembali biaya operasional perusahaan sebelum membagi untung dengan pemerintah. *Cost recovery* merupakan salah satu dari bentuk kebijakan untuk mengatur eksplorasi, produksi, dan pengelolaan sumber daya energi. Konsep *cost recovery* di Indonesia diperkenalkan melalui skema *Production Sharing Contract* (PSC) yang menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pemilik sumber daya alam tidak perlu mengeluarkan modal awal untuk eksplorasi dan produksi. Kemudian, perusahaan sebagai penanggung biaya memiliki hak untuk klaim kembali biaya yang sudah dikeluarkan dan sisa dari keuntungan akan dibagi antara pemerintah dan perusahaan sesuai dengan perjanjian kontrak (Soesanto, et al., 2024)(Edy Soesanto et al., 2024).

Agricultural development atau pembangunan pertanian pada *cluster* 9. Ketahanan pangan pada suatu wilayah juga memiliki keterkaitan pada bidang ekonomi yaitu permasalahan inflasi dan kenaikan harga. Apabila terjadi lonjakan harga pangan yang terjadi di sebuah negara berkembang, maka akan menjadi kontributor dominan pembentuk inflasi. Gangguan pasokan kebutuhan pangan di suatu daerah dipengaruhi oleh kondisi fisik, frekuensi, dan dampak dari bencana. Instrumen fiskal pemerintah yang berpengaruh positif terhadap penguatan ketahanan pangan daerah adalah Dana Alokasi Khusus Non-Fisik (DAKNF) di samping instrumen fiskal yang ada lainnya (Muharja & Mizan, 2025). Sektor pertanian memberikan dampak dan mempengaruhi dari kebijakan fiskal di Indonesia.

Pada *cluster* 10 kata kunci utama adalah *crowding-in effect* yang merupakan istilah yang mengacu pada kondisi pengeluaran atau investasi pemerintah mendorong sektor swasta untuk ikut terlibat dalam berinvestasi dan meningkatkan perekonomian. Kehadiran pemerintah memunculkan efek domino yang positif pada sektor perekonomian. Pemerintah dan swasta memiliki keterkaitan yang sangat kompleks dalam meningkatkan laju perekonomian di Indonesia. Kebijakan fiskal merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk mempercepat pembangunan daerah untuk mencapai tujuan seperti peningkatan laju investasi, mendorong investasi optimal, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan stabilitas perekonomian, menanggulangi masalah inflasi, peningkatan dan pendistribusian pendapatan nasional (Adiningsih, 2013).

Tema yang mendominasi penelitian terkait kebijakan fiskal

Berdasarkan hasil pengolahan data mengenai artikel-artikel yang mengangkat tema kebijakan fiskal, ditemukan tema-tema yang memiliki keterkaitan yang mendominasi. Pengkategorian atau pengelompokan tema-tema dominan dilakukan untuk memfokuskan kajian sehingga hasil analisis dapat menghasilkan kesimpulan yang relevan. Proses ini juga berfungsi mempermudah peneliti dalam memetakan keterkaitan antar topik yang memiliki hubungan erat dengan isu utama. Dalam kajian mengenai kebijakan fiskal, langkah kategorisasi dan klasifikasi diperlukan untuk melakukan verifikasi dan pemilahan data, sehingga materi yang dianalisis benar-benar selaras dengan fokus penelitian. Dengan demikian, pembahasan dapat diarahkan secara sistematis, terhindar dari keluasan topik yang berlebihan, serta menjaga kedalaman analisis pada aspek-aspek yang paling substansial. Pada penelitian ini VOSviewer digunakan sebagai alat untuk pengelolaan data yang menghasilkan tema atau konsep yang mendominasi mengenai kebijakan fiskal di Indonesia. Kebijakan fiskal, Indonesia, desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, kebijakan publik, dan sebagainya merupakan tema yang paling mendominasi. Pada

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i1.1520

Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi
Vol. 4 No. 2 Tahun 2025
e:ISSN: 2828-7770, p-ISSN: 2985-573x, Hal 383-395
Annisa Larasati Chairani,Rindy Putri Hapsari, Ina Masruroh
Available Online at: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/index

Gambar 5 menunjukkan seberapa dominan kelompok fokus tersebut yang ditandai dengan warna kuning atau semakin terang warna pada gambar. Setiap konsep yang ditunjukkan pada gambar 5 memiliki hubungan atau keterkaitan satu sama lain yang akan mempermudah proses hingga penarikan kesimpulan penelitian yang sejalan dengan studi terkait kebijakan fiskal.

Gambar 5. Topik terkait kebijakan fiskal

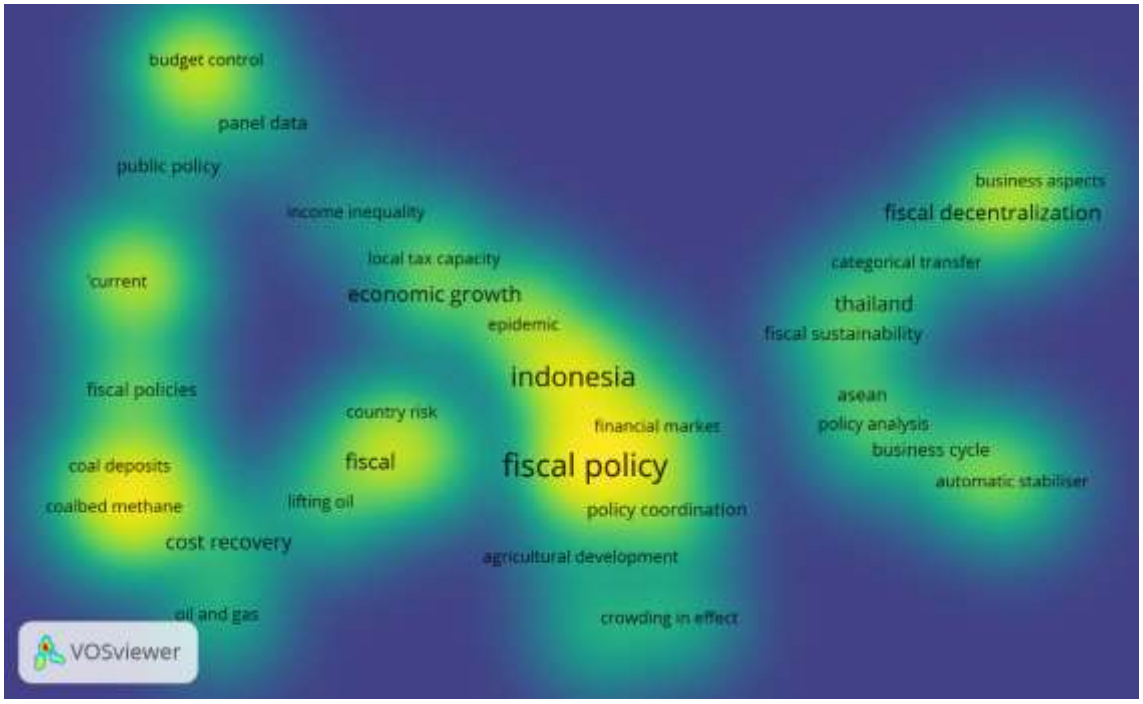

Sumber: Database Scopus, data diolah (2025)

Periode publikasi artikel mengenai kebijakan fiskal

Berdasarkan hasil data yang telah diolah menggunakan VOSviewer terkait penelitian dengan studi kasus mengenai kebijakan fiskal berdasarkan artikel-artikel yang telah ditelaah. Pada gambar 6 menunjukan berbagai artikel mengenai kebijakan fiskal yang dipublikasi antara tahun 2018 hingga 2024, dimana tiap tahunnya memiliki tren pembahasan yang berbeda.

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i1.1520

Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi
Vol. 4 No. 2 Tahun 2025
e:ISSN: 2828-7770, p-ISSN: 2985-573x, Hal 383-395
Annisa Larasati Chairani,Rindy Putri Hapsari, Ina Masruroh
Available Online at: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/index

Gambar 6. Tren publikasi kebijakan fiskal

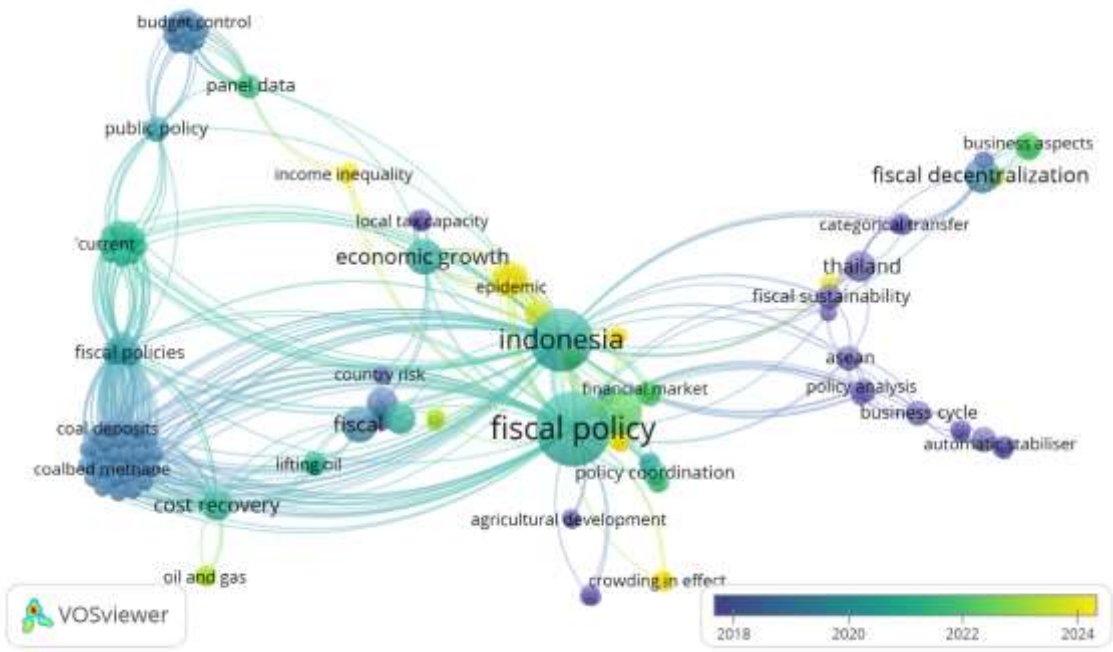

Sumber: *Database* Scopus, data diolah (2025)

Pada tahun 2018 yang direpresentasikan dengan warna ungu menunjukkan bahwa topik seperti fiskal berkelanjutan, analisis kebijakan, siklus bisnis, *automatic stabilizer*, Thailand, ASEAN, *categorical transfer*, kapasitas pajak lokal, dan pembangunan pertanian. Tahun 2019 dengan warna biru tua publikasi mengenai fiskal, *budget control*, endapan batubara, dan *coalbed methane*. Tahun 2020 dengan warna biru toska menunjukkan topik terkait kebijakan fiskal, Indonesia, pertumbuhan ekonomi, *cost recovery*, *current* (keadaan kebijakan fiskal dan kebijakan publik saat ini), panel data, dan koordinasi kebijakan. Tahun 2021 dengan warna hijau tua, publikasi kebijakan fiskal dominan membahas terkait aspek bisnis. Pada tahun 2022 dengan warna hijau muda menunjukkan topik *financial market* yang mendominasi publikasi mengenai kebijakan fiskal. Topik terkait minyak dan gas mendominasi publikasi terkait kebijakan fiskal pada tahun 2023 dengan dengan representasi warna hijau neon. Tahun 2024 dengan warna kuning menunjukkan bahwa topik seperti epidemik, ketimpangan pendapatan, dan efek *crowding-in* mendominasi publikasi terkait kebijakan fiskal. Berdasarkan hasil penemuan yang terkait penelitian kebijakan fiskal pada beberapa tahun terakhir, dapat terlihat bahwa tiap tahunnya memiliki tema-tema berbeda. Hal tersebut disebabkan di Indonesia sendiri tiap tahunnya memiliki isu-isu yang beragam, sehingga para penulis mengangkat tema-tema yang menyesuaikan dengan keadaan saat itu.

KESIMPULAN

Bagian ini menyajikan kesimpulan yang ringkas dan akurat menjawab tujuan penelitian, juga termasuk implikasi teoritis, batasan dan usulan/arah bagi riset selanjutnya Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* untuk menganalisis perkembangan kajian kebijakan fiskal di Indonesia. Temuan utama menunjukkan adanya peningkatan publikasi terkait kebijakan fiskal di tahun 2017 dan 2024. Penelitian mengidentifikasi empat penulis dengan publikasi terbanyak terkait topik ini. Melalui analisis *cluster* menggunakan VOSviewer, penelitian ini

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i1.1520

mengidentifikasi 10 kelompok tema yang terkait dengan kebijakan fiskal di Indonesia dari 44 artikel Scopus yang relevan. Hasil penelitian juga mengindikasikan adanya pergeseran fokus penelitian menuju isu-isu kebijakan fiskal yang lebih spesifik dan kontekstual sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional dan isu-isu tahunan (misalnya, topik epidemi dan *crowding-in effect* di tahun 2024). Kebijakan fiskal, Indonesia, desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan publik adalah tema-tema yang paling mendominasi. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan dalam memahami arah perkembangan kajian kebijakan fiskal di Indonesia serta mengidentifikasi potensi agenda riset di masa depan.

SARAN

Beberapa saran untuk peneliti selanjutnya atau saran untuk tempat yang diteliti, yang dapat merujuk pada implikasi teoritis, penelitian dapat menjadi dasar untuk pengembangan teori lebih lanjut mengenai kebijakan fiskal dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Keterbatasan pada penelitian ini hanya menemukan tren dalam beberapa tahun terakhir mengenai penelitian dengan topik *fiscal policy*, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pembahasan yang lebih mendalam. Hasil dari penelitian ini dapat membuka peluang untuk penelitian di masa depan dengan tema yang belum banyak dieksplorasi atau area yang memerlukan pendalaman lebih lanjut berdasarkan kesenjangan yang ditemukan dalam tinjauan literatur. Hal ini bisa mencakup studi yang lebih mendalam pada kluster-kluster tertentu atau eksplorasi isu-isu fiskal yang muncul dari dinamika ekonomi terkini.

DAFTAR PUSTAKA

Adiningsih, S. (2013). *Koordinasi dan interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter: Tantangan Ke Depan*. Kanisius.

Andrian Nova P, E. W., & Nusri Leapatra Chamalinda, sh. (2023). *Potret Peran Pajak Daerah pada Saat Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19* (Vol. 11, Issue 2).

Anggelina, B., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Tax Aggressiveness: Bagaimana Pengaruh Board Gender Diversity? *E-Jurnal Akuntansi*, *32*(4), 912. https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i04.p07

Antari Yuliana, N., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, *2*(1), 55–64. https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.986

Bendesa, I. K. G., & Wiwin Setyari, N. P. (2020). Kebijakan Fiskal dalam Trend Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 1. https://doi.org/10.24843/jekt.2020.v13.i01.p01

Edy Soesanto, Ridwan Zaidaan, & Shidqul Azaim Ahiraf. (2024). Peran Cost Recovery pada Sektor Minyak dan Gas Bumi dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional. *Globe: Publikasi Ilmu Teknik, Teknologi Kebumian, Ilmu Perkapalan*, *2*(4), 307–316. https://doi.org/10.61132/globe.v2i4.675

Fatás, A., & Mihov, I. (2003). *The Case for Restricting Fiscal Policy Discretion*.

Fitriaini, R., kunci, K., Fiskal, K., Kebijakan Fiskal, P., & stabilisasi, K. (2022). Pola Kebijakan Fiskal di ASEAN: Kontrasiklikal atau Prosiklikal? In *Parahyangan Economic Development Review (PEDR)* (Vol. 1, Issue 1).

Hania Cholily, V. (2023). Pajak Pusat dalam Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *3*(1), 91–112. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.743

Hardinata, A. R. (2010). Kebijakan Kriminalisasi dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Fiskal. *LAW REFORM*, *4*(1), 44. https://doi.org/10.14710/lr.v4i1.321

Hendarsih, I. (2023). Implementasi Multiplier Pajak Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Di Indonesia Tahun 2010 s/d 2022. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *10*(1), 95–99.

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i1.1520

https://doi.org/10.31294/moneter.v10i1.15562
Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, *3*(1), 24–36. https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1202
Kakwani, N. C. (n.d.). *Income Inequality and Poverty Methods of / 00 2Z Estimation and Policy Applications*.
Kalventri, M., & Mulyani. (2022). Keberadaan Profitabilitas, Biaya Operasional dan Leverage Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Publik Sektor Kesehatan. *Jurnal Akuntansi*, *11*(1), 13–23. https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.857
Kholis, N., & Kurniawati, L. (2022). Tax Evasion: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Menurut Persepsi Wajib Pajak. *Akuntabilitas*, *15*(2), 241–250. https://doi.org/10.15408/akt.v15i2.28588
Martiyus, J. (2021). Tax Revenue Diversification in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, *22*(1), 48–58. https://doi.org/10.18196/jesp.v22i1.7523
Martowardojo. (2018). *Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan*. Bank Indonesia.
Muharja, F., & Mizan, A. A. (2025). *Kebijakan Fiskal dan Ketahanan Pangan di Provinsi Sumatera Barat*.
Pahlevi, R., Thamrin, S., Ahmad, I., & Nugroho, F. B. (2024). Masa Depan Pemanfaatan Batubara sebagai Sumber Energi di Indonesia. *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan*, *5*(2), 50–60. https://doi.org/10.14710/jebt.2024.22973
Paso, A., & Puspita, W. D. (2020). Evaluasi efektivitas tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, *2*(2), 29–36. https://doi.org/10.26905/j.bijak.v2i2.5743
Pratomo, A. W. (2020). The Effect of Foreign Direct Investment on Tax Revenue in Developing Countries. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, *13*(1), 83–95. https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i1.484
Rahayu, N. (2010). Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *7*(1), 61–78. https://doi.org/10.21002/jaki.2010.04
Rismawati, E., & Saputra, P. (2012). Pengaruh Variabel Pajak Dan Variabel Makroekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, *1*(2).
Saputri, I. P., & Kamil, I. (2021). Praktik Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dipengaruhi Oleh Faktor Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi dan Deteksi Kecurangan (Studi Kasus Pada RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan RS Anak dan Bunda Harapan Kita). *Jurnal Perspektif Manajerial dan Kewirausahaan (JPMK)*, *1*(2), 148–163. https://doi.org/10.59832/jpmk.v1i2.52
Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, *1*(4), 1–10. https://doi.org/10.47134/jeae.v1i4.231
Sari, R. (n.d.). *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Daerah Tertinggal di Indonesia (Fiscal Desentralization Policy on Disadvantaged Regions in Indonesia)*.
Soepangat, E., & Gaol, H. L. (1991). *Pengantar Ilmu Keuangan Negara*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
Susanto, D. A. (2022). Eksplorasi Implementasi Reformasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, *9*(2), 195–202. https://doi.org/10.33366/ref.v9i2.1819
Susanto, E. A., & Muslimin, M. (2022). Determinan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Proaksi*, *9*(2), 112–126. https://doi.org/10.32534/jpk.v9i2.2740
Susilo Arneta Wynne, T. (2023). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan GCG Terhadap Tax Avoidance dan Perbedaan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Makanan dan Minuman di Bursa Efek Asean Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, *4*(2), 143–168. https://doi.org/10.37715/mapi.v4i2.3712
Yanti, N., & Nurtati, N. (2020). Economic Growth: Impact of Locally-Generated Revenue And Balance Funds Moderated by Capital Expenditure. *Jurnal Pembangunan Nagari*, *5*(1), 40. https://doi.org/10.30559/jpn.v5i1.173

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i1.1520